MENGENALI KONTEKS AJARAN SOSIAL GEREJA KATOLIK ABAD XIX

A. Eddy Kristiyanto

Abstrak:

This article presents contextual arguments on the social problems addressed by the Catholic Church. The thought was developed in the 19th century with its industrialization that caused an enormous social as well as technological change, and that aimed a great social welfare. Unfortunately, industrialization was not identical with merely a social progress. Ideology such as liberalism or communism was conflictive and socially problematic. The victims have been the workers with their family amid the weakening of system of education, healthcare, morality and sense of faith. Involvement and intervention of the nation was supported by thinkers such as philosophers, experts in economy and politic as well as theologians and practitioners. Catholic Church with its option for the poor has based her vision on the fundamental commitment to human dignity, sacredness of life as well as the social nature of human being. *Rerum Novarum*, the encyclical letter of pope Leo XIII, presented a very significant insights concerning the world of workers, of policy makers, factory owners and people from human rights watch.

Kata-kata Kunci:

martabat manusia, masalah sosial, industrialisasi, Katolik sosial, sosialisme, liberalisme, kaum dan serikat buruh

1. Pengantar

Institusi keagamaan, dalam hal ini Gereja Katolik, merupakan satu-satunya lembaga yang secara jelas, terinci, dan berkelanjutan merumuskan sikap serta ajarannya di hadapan kenyataan sosial-kemasyarakatan yang terus-menerus berubah. Sikap dan ajarannya itu tertuang dalam himpunan Ajaran Sosial Gereja Katolik[1] (selanjutnya disingkat ASGK). Meskipun asas-asas dan pokok-pokok yang diangkat dalam ASGK sangat fundamental, karena menyangkut kemanusiaan, namun hal itu tidak usah harus berarti bahwa ajaran ini mengikat (dan pasti diterima oleh) semua Gereja.

Munculnya ASGK hendak mempertegas kenyataan bahwa Gereja Katolik bukanlah salah satu lembaga dalam kisaran lembaga-lembaga Gereja, melainkan salah satu dari sedikit Gereja yang hierarkis. Dengan kata lain, ajaran sosial tidak

bakal ditemukan dalam Gereja Bethel, Methodis, Evangelis, Pantekostal dan semua denominasi protestantisme khas Amerika Utara, yang utamanya mengupayakan kesalehan-kesalehan entah komunal entah individual. Suatu kesalehan, yang tentu saja dapat diupayakan dan direngkuh, tanpa bersinggungan dengan soal-soal sosial-kemasyarakatan.

Dalam tulisan berikut ini[2] hendak diperlihatkan bagaimana situasi sosial-politik, kultural dan ekonomi turut menentukan sikap Gereja Katolik di Eropa Barat, yang akhirnya secara visioner dan kreatif menciptakan tradisi yang benar dan sahih. Oleh karena itu, naskah ini tidak pernah mengklaim inilah Ajaran Sosial Gereja – kendati kami tetap yakin bahwa suara dan kebenaran yang dikemukakannya melampaui sekat-sekat lembaga keagamaan. Sebab di sana dikemukakan soal kemanusiaan, moral, keadilan, perdamaian yang pada hakikatnya mengenai siapa pun dalam situasi mana pun juga. Soal-soal ini pun memiliki keterbatasan, jika hanya disawang dari sudut pandang kekatolikan. Oleh karena itu, Gereja Katolik tidak pernah mengaku bahwa ajaran sosialnya sebagai satu-satunya takhta kebenaran. Ajaran ini kiranya hanya mempertegas posisi kekatolikan dalam rangka berdialog dengan dunia yang otonom sekaligus niatan tulus untuk berjumpa serta bekerja sama dengan orang-orang yang bekehendak baik. Kemudian akan menjadi jelas, bahwa ajaran ini dalam naskah ini sangat kental berlatar Eropa, yang dalam sejarahnya telah mempersubur dan mempertajam dimensi kemanusiaan yang tengah dilanda krisis. Pada gilirannya krisis ini menggerogoti relasi antar-sesama yang mengundang ruang dan wilayah sosio-religius untuk intervensi di dalamnya.

2. Konteks Sosial Eropa Barat Abad Ke-19

Untuk memperlihatkan kompleksitas masalah sosial di Eropa abad ke-19 dan peranan Gereja, karya ini berturut-turut mengedepankan konteks situasional, yang meliputi biang masalah sosial yang diupayakan untuk diobati secara berdaya guna. Dalam kaitan itu, lembaga Gereja Katolik bereaksi terhadap masalah sosial tersebut. Tentu saja, reaksi itu sangat tergantung dari "sekolah" atau "aliran" manakah berasal. Hal-hal ini mematangkan bagi lahirnya sikap Gereja Katolik terhadap masalah sosial yang bercorak multidimensi, dan oleh karena itu tidak dapat ditangani hanya dengan menggunakan satu jurus dan kekuatan semata-mata. Pendekatan dan sumbangan multidisipliner dengan demikian merupakan keniscayaan.

Fakta sosial Eropa abad ke-19 memperlihatkan bahwa teknologi dan industrialisasi berkembang serta diterapkan secara masif di kontinen dan sub-kontinen Eropa tersebut.[3] Dalam hal ini, Gereja Katolik memiliki peranan tak tergantikan terutama sebagai kekuatan moral-religius, bahkan politis-kemasyarakatan di wilayah Eropa, berkepentingan untuk mengawal agar perkembangan sains dan pemanfaatannya sungguh membantu tercapainya kesejahteraan umum yang adil-merata.

Ada dua fenomena interaktif yang mencirikan masyarakat Eropa Barat pada abad ke-19.[4] *Pertama*, fenomen yang mengacu pada kemajuan pesat di bidang teknik, industri, perniagaan. Kemajuan ini membawa dampak luar biasa di bidang pola hidup, kultur dan keadaan sosial pada umumnya.[5] Di samping itu, kemajuan tersebut membuktikan bahwa manusia telah berhasil 'menaklukkan dan menguasai alam semesta', memperpendek jarak waktu tempuh dan 'mematahkan belenggu yang puluhan abad lamanya mengkondisikan kehidupannya'. *Kedua*, fenomen 'kemajuan' itu kemudian disusul dengan tingkat kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan banyak orang.

Diawali dengan lahirnya industri-industri raksasa (yang menerapkan penemuan-penemuan teknologis secara besar-besar, dan yang mengasumsikan penanaman kapital yang tidak kecil jumlahnya) di Inggris pada akhir abad ke-18; di Prancis, Belgia, Jerman pada awal abad ke-19, dan di Italia pada akhir abad ke-19, dalam kenyataannya hal ini menciptakan sentralisasi kekayaan di tangan beberapa orang atau kelompok pengusaha. Pada awal abad ke-19 *pauperisme*[6] yang sering dirumuskan dengan tegas sebagai massa proletar (yakni mereka yang bekerja dengan mengandalkan kekuatan otot, tak miliki kecakapan, tanpa ketrampilan dan pelatihan khusus, tidak memiliki alat-alat produksi, dan mereka terpaksa menjual kekuatan tenaga mereka demi menyambung nyawa) senantiasa didramatisasi dengan 'kaum lemah' yang terpaksa bekerja tanpa asas kemanusiaan.

Kondisi kaum buruh saat itu biasanya diperikan sebagai berikut.[7] Selama puluhan jam dalam sehari (sekitar 15 jam setiap hari) mereka yang "mengemis" (artinya: menghamba dan menggantungkan hidup) pada 'kapitalis' nyaris selalu mengulang gerakan yang sama, dalam lingkungan kerja yang tidak sehat sama sekali, buruh perempuan dan anak-anak (tidak sedikit yang sudah bekerja di pabrik sejak usia 6 tahun) bekerja tanpa banyak dikecualikan, tidak ada asuransi kesehatan (apalagi Dana Hari Tua); *ransum* makan yang tidak bergizi dan hanya bermanfaat untuk mengganjal perut, *bèdèng* tempat tinggal yang jorok dan pengap, keselamatan kerja tidak ada yang menjamin, upah kerja yang hanya cukup untuk menyokong biaya hidup diri sendiri, tidak termasuk keluarganya, berjangkitnya *tuberculosis* dan *bronchitis* yang tersebar di kalangan buruh yang hidup tanpa pembelaan ini, dan tingkat kehidupan moral pun 'dicap' rendah. Boleh diperkirakan: apakah alkoholisme dan pelacuran akan menjadi tempat 'pengungsian' sementara mereka?[8] Situasi petani di wilayah-wilayah yang belum dijamah industrialisasi tidak lebih baik.[9] Dalam situasi seperti ini para kapitalis yang taat beragama dan para petinggi negara seringkali hanya memberikan nasihat saleh agar 'para buruh' tetap sabar, tabah, tenang dalam memanggul salib Kristus. Sesungguhnya, sebagaimana dikatakan oleh Casimir Périer (setelah meletusnya kekacauan di Lyon, 1831) kondisi perburuhan yang 'memelas' ini menyingkap pula kondisi buruk lingkungan keluarga,

pendidikan, institusi keagamaan, masyarakat pinggiran, peradaban, hukum. Inilah lingkup dan cakupan masalah sosial.

2.1. Akar dan Biang Masalah-Masalah Sosial

Sebenarnya sangat muskil memastikan kapan Revolusi Industri muncul untuk pertama kalinya di kawasan Eropa Barat. Jawaban para pakar, seperti Arnold Toynbee,[10] William Rostow[11], atas kemuskilan tersebut berbeda satu sama lain. Tidak demikian halnya dengan penetapan tanggal meletusnya Revolusi Prancis. Sebab revolusi ini berawal dan memuncak dengan sangat jelas. Gelombang kerusuhan dan tindakan anarkis dari pelbagai kelompok massa yang kecewa atas sistem politik yang dianut penguasa terjadi pada tahun 1789[12]. Dalam konteks Revolusi Industri secara bertahap para peneliti dan teknisi mengupayakan hasil temuan mereka dalam skala kecil-kecilan dan diaplikasikan dalam lingkup terbatas. Penegasan Ashton berikut ini menyatakan apa yang sesungguhnya terjadi. "About 1760 a wave of gadgets swept over England ... It is not only gadgets, however, but innovations of various kinds – in agriculture, transport, manufacture, trade, and finance – that surge up with a suddenness for which it is difficult to find a parallel at any other time or place.[13] Penemuan ini kemudian diaplikasikan dalam lingkup besar-besaran di industri pemintalan benang dan tekstil serta industri terkait.

Sejalan dengan itu, Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Jean-Baptiste Say (1767-1832), Richard Cobden (1804-1965), dan John Bright (1811-1889)[14] mengembangkan politik ekonomi, yang banyak memberikan inspirasi segar, memotivasi serta membesarkan hati para pemilik modal yang menerapkannya dalam dunia industri. Doktrin ekonomi, yang dikembangkan Mazhab Manchester[15] dan kemudian disebut *Liberalisme Ekonomi,* memuat empat gagasan: Ekonomi yang mengesampingkan pertimbangan-pertimbangan dan prinsip-prinsip moral, seperti kebaikan dan kemurahan hati, amal kasih; Penerapan persaingan bebas sebagai konsekuensi langsung dari liberalisme absolut yang dijunjung tinggi sebagai asas tertinggi; Negara tidak boleh campur tangan dalam praksis liberalisme terutama dalam bidang perekonomian ini, karena institusi negara tidak memiliki kewenangan dalam proses ini; Individualisme merupakan matra tertinggi yang tidak terganggu gugat oleh siapa pun atau lembaga mana pun juga dan hanya boleh dihormati serta dijunjung tinggi.

Dengan prinsip dan praksis ekonomi yang *tidak mengenal pertimbangan moral* dimaksudkan suatu kebijakan yang memisahkan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi dari nilai-nilai moral dan hormat pada martabat manusia. Dalam doktrin ekonomi dan pelaksanaannya hanya dikenal kaidah sebab-akibat. Karena itu, tidak pada tempatnya dalam sistem ini orang berbicara tentang benar dan tidak

benar. Upah dan buruh, misalnya, hanya harus mengikuti norma permintaan-penawaran serta kesepakatan bersama, di mana pemilik modal mempunyai posisi dominatif daripada para buruh.

Persaingan bebas (secara historis) dimaksudkan untuk mengatasi kendala perkembangan perekonomian yang telah ditetapkan oleh negara absolut. Kendala itu misalnya merkantilisme dan korporasi sebagaimana terdapat dalam tata perekonomian Abad Pertengahan. Di dalam kenyataannya, persaingan bebas menghantam telak semua kelompok marginal dan lemah, yang dalam hal ini adalah kaum buruh dan anggota keluarganya, yang menggantungkan hidup mereka pada kinerja "buruh". Mengapa? Karena untuk mengurangi biaya produksi para 'kapitalis' berkecenderungan memotong upah buruh dan memperpanjang jam kerja.

Campur tangan negara di bidang ekonomi tidak bermanfaat, bahkan merugikan. Oleh karenanya, campur tangan dalam bentuk apa pun selalu tidak dibenarkan dan tidak bermakna. *Merugikan* karena intervensi hanya akan memperlambat tindakan individu-individu yang pada prinsipnya bebas-merdeka. *Tidak benar* karena negara melalui intervensi hanya berarti membatasi dan memasung (tanpa perlu) kebebasan setiap orang. Negara-negara liberal memegang teguh pandagan ini, sehingga bisa dimengerti mengapa intervensi negara dalam hal ekonomi (terutama dalam hal melindungi rakyat atau warga yang lemah sangatlah lambat.[16]

Dengan *individualisme* (dalam traktat ini) mau ditekankan suatu paham yang menegaskan bahwa hak milik yang pada prinsipnya tidak lagi berfungsi sosial. Paham ini dalam praktiknya membawa dua akibat: larangan untuk membuat kontrak kolektif dan larangan untuk membuat serikat orang-orang seprofesi. Yurisprudensi liberal kemudian dimaklumkan, yang berisi kebebasan mutlak untuk melakukan kontrak kerja. Setiap persetujuan (antara majikan dan buruh) tidak melanggar keadilan; dan negara tidak dapat memodifikasikannya.

Pelaksanaan prinsip ekonomi liberal oleh para 'kapitalis' mengontang-antingkan para buruh, 'kaum proletrar'. Itulah sebabnya, liberalisme ini dipandang sebagai biang masalah sosial; dan pada gilirannya melahirkan sosialisme.[17]

2.2. Obat Mujarab atas Masalah Sosial

Beberapa tokoh yang alam pikiran dan praksisnya mempunyai dampak signifikan bagi ajaran sosial Gereja ditampilkan sebagai berikut.[18] Refleksi filosofis-sosial pasti tidak akan melewatkan pemikiran K. Marx – F. Engels[19], yang sering menyebut diri mereka sendiri sebagai golongan sosialis ilmiah. Sebutan ini terutama berlandaskan anggapan bahwa premis-premis serta dalil-dalil yang mereka utarakan

didasarkan bukan pada studi dan riset buku-buku yang disusun di bangku-bangku universiter, melainkan karena dihasilkan, dianalisis, dan ditata dari realitas pergumulan di lapangan. Tidak ada tempat bagi spekulasi dalam rangka menyusun kerangka teori.

Selain itu, para pemikir seperti Henri de Saint-Simon (1760-1825), Charles Fourier (1772-1837), Joseph Proudhon (1809-1865) yang menggemakan kembali ungkapan *Qu'est-ce que la proprieté?* (artinya: apakah hak milik itu?) digolongkan dalam kelompok sosialis utopis.[20] Bagi Proudhon tidak ada pengartian ideologis lain kecuali bahwasanya hak milik pribadi itu tidak ada. Bahwa dalam praksis hidup bermasyarakat ada pribadi-pribadi tertentu yang memiliki kekayaan personal tentulah itu suatu indikasi adanya penyelewengan. Oleh karena itu harus diupayakan adanya lembaga yang berkuasa dan mengatur pengembalikan hak milik pribadi (yang memang seharusnya tidak ada) dan menguasai hak milik. Lembaga itu juga berperan menjamin semua kekayaan masyarakat terbagi rata dan adil. Peran itu kiranya hanya dapat dimainkan oleh negara yang berdaulat dan autoritatif, mengingat akan ada perlawanan dari masing-masing pribadi (yang mungkin menggalang kekuatan bersama semua orang yang berkepentingan sama) terhadap dasar hukum dan undang-undang yang mengatur dan menguasai "hak milik pribadi" termaksud. Jadi, masing-masing golongan dan kelompok menyodorkan obat mujarab demi menyembuhkan ketidakadilan dalam masyarakat.

3. Reaksi Gereja terhadap Situasi dan Masalah Sosial

Sementara orang liberal memperlihatkan diri sebagai kelompok yang mempertahankan *status quo*, dan para sosialis membentuk Partai Politik serta menggalang pelbagai kekuatan dari serikat buruh (yang dimaksudkan untuk mendongkel struktur yang ada!), bagaimana sikap Gereja (awam dan hierarki)?[21]

Ada kalanya dikatakan bahwa Gereja Katolik terlalu lambat menyadari situasi dan masalah sosial kemasyarakatan. *Di satu pihak*, di dalam Gereja ada kecenderungan relatif kuat untuk menerima situasi itu dengan sabar, menerima keadaan miskin, ketidakadilan, mengenali dalam situasi itu makna dan pesan injili. Mereka yang bersikap demikian ini biasanya mempraktikkan amal kasih dan memberikan derma. *Di lain pihak*, ada perkembangan kesadaran dari mentalitas paternalistis ke pengakuan akan hak-hak kaum buruh. Selain itu, kemudian ada usaha-usaha konkret untuk membela hak-hak kaum buruh.[22] Reaksi kelompok-kelompok dalam Gereja dapat dikategorikan sebagai berikut.

3.1. Kubu Konservatif

Beberapa Paus abad ke-19 memusatkan perhatian pada pokok-pokok berikut ini. Para Bapa Suci *mempertahankan gagasan dan ajaran tentang hak milik*. Argumen di balik dipertahankannya hak milik adalah hak milik itu termasuk dalam hak-hak

dasar manusia. Tanpa hak itu manusia tidak bisa memenuhi panggilannya sebagai citra dan gambaran Allah (*imago* Dei). Tanpa hak milik manusia tidak mampu mengembangkan jati dirinya sebagai makhluk yang bebas-merdeka serta otonom. Para Bapa Suci juga *melakukan generalisasi atas pandangan dan paham ideologis yang kemudian dikecamnya*, tanpa menguji secara cermat tesis-tesis yang dimajukan oleh para penulis baik dari kalangan sosialisme maupun komunisme. Dari generalisasi ini tentu hanya akan dihasilkan suatu kesan yang kasar, tidak menyentuh, dan akhirnya memperbesar sikap praduga yang merupakan tabu di lingkungan kaum cerdik pandai. Selain itu, para Bapa Suci *membesarkan hati kaum miskin* agar dengan tabah dan sabar hati menanggung penderitaan sementara itu. Perhatian ini kiranya mempertegas keadaan bahwa sesungguhnya para anggota hierarki jauh dari kenyataan faktual, tidak akrab dengan penderitaan dan kekurangan-kekurangan hidup kaum buruh (baca: klas bawah dalam hierarki masyarakat warga). Poin ini sering kali dipandang sebagai bentuk legitimasi penderitaan dan ketidakadilan sebagai jalan kemanusiaan yang wajar dengan bungkus-bungkus kesalehan religius yang palsu.

Kecaman terhadap sosialisme dan komunisme sudah tampak sejak tahun 1846 dalam ensiklik Pius IX berjudul *Qui pluribus*. Kecaman yang sama diulanginya dalam *Syllabus Errorum* (Daftar Kesalahan-Kesalahan pada Zaman Modern, 8 Desember 1864)[23] dan *Quanta cura*, 1864. Sri Paus juga mengutuk ekonomi yang amoral dan penyangkalan terhadap setiap hak 'kodrati.' Tampak bahwa hal-hal ini (baca: liberalisme-kapitalisme) dipandang kurang begitu berbahaya ketimbang sosialisme dan komunisme. Kedelapan puluh dalil *Syllabus* dapat dikelompokkan menjadi empat: Kesalahan panteisme, naturalisme, naturalisme, rasionalisme absolut, indiferentisme. Kemudian, kesalahan berhubungan dengan etika dan moral, terutama mengenai perkawinan. Lalu, kesalahan yang berhubungan dengan sifat relasional antara Gereja dan dalam hubungannya dengan Negara. Akhirnya, kesalahan yang berhubungan dengan sosialisme, komunisme, serkat rahasia (*freemasonry*), serikat-serikat Kitab Suci, serikat imam-imam merdeka, dan liberalisme.[24]

Panitia Persiapan yang dibentuk antara lain untuk memberi masukan bagi terselenggaranya Konsili Ekumenis Vatikan I, 22 Juli 1869, juga sudah menyiapkan kecaman terhadap komunisme dan sosialisme. Pada saatnya juga dibicarakan hubungan antara Gereja dan masalah sosial, ada komisi yang mempersiapkan naskah, kemudian dilakukan diskusi, tetapi hasilnya tidak sempat diolah lebih lanjut. Konsili ini terpaksa dihentikan di tengah jalan, lantaran intervensi pasukan Giuseppe Garibaldi (1807-1882) yang menyeruak masuk dan menguasai kota Roma. Para konsiliaris bubar sebelum konsili ditutup secara formal. Konsili ini merupakan tragedi besar bagi lembaga Gereja Katolik, karena intervensi itu menyudutkan dan menempatkan Bapa Suci di ruang tahanan, yang kemudian menjadi wilayah negara Vatikan.

Pada mulanya, Bapa Suci Leo XIII tidak berdiri jauh dari mentalitas zamannya. Dalam *Quod Apostolici Muneris* (1878) Paus Leo XIII mengecam sekali lagi sosialisme, menegaskan arti-pentingnya hak milik, meminta bahkan mendesak orang-orang kaya untuk memperbesar sikap belas kasih dengan memberi derma (lebih banyak lagi) kepada orang-orang miskin sebagai bentuk "jalan keluar" dari situasi tidak menguntungkan tersebut. Terlihat pada mulanya, bahwa soal ketidakadilan yang menjadi latar belakang seluruh problematik sosial dicoba diatasi dengan tindakan sosial karitatif (baca: bersedekah). Tentu saja, tindakan ini hanya mengobati unsur-unsur luaran, dan tidak mencabut akar permasalahan. Ide yang kurang lebih sama tampak pula dalam Ensiklik *Auspicato Concessum*.[25] Ensiklik lain yang berjudul *Graves de communi* (1901) yang mendefinisikan paham demokrasi sebagai 'perbuatan Kristen yang baik demi rakyat.' Ini berarti menyingkiri setiap bentuk keterlibatan politis. Sikap ini secara historis merupakan buah dari situasi transisizaman itu.

Ada seorang imam Anonim dari Napoli (Italia), 1889, yang menerbitkan suatu buku. Buku ini dimaksudkan untuk mengomentari ensiklik Leo XIII, *Libertas* [26]. Si Anonim menandaskan 'Sosialisme dan komunisme adalah anak kodrati liberalisme'. Penegasan ini sama sekali tidak baru, sebab uskup Mainz, Ketteler, sudah pada tahun 1864 mengatakan hal yang sama dalam bukunya *Die Arbeiterfrage und das Christentum*, Mainz 1864.[27] Oleh karena itu, yang pertama-tama diperangi Ketteler adalah liberalisme. Mengingat usaha gigih Ketteler tersebut orang menyematkan stigma pada Uskup Mainz sebagai 'pastor sosialis'. Si Anonim itu tidak melihat obat mujarab bagi masalah sosial, kecuali menyerahkan nasib orang miskin pada kedermawanan orang kaya, lalu ia mengarahkan corong pengeras suaranya ke arah negara-negara industri, katanya, *Kalian ingin memecahkan setiap masalah dengan asketisme. Oleh karena itu, saya menantang kalian: Tunjukkanlah kepada kami jalan keluar yang berbeda daripada yang sudah saya tunjukkan*. [28]

3.2. Kubu Sosial Perdana (1870-1878)

Dalam upaya mempelajari visi dan praksis kelompok sosial murni dalam Gereja Katolik ada baiknya jika melihat periodisasi berikut ini:

Hingga tahun 1870 kita pun dapat merentangkan periode itu hingga tahun kematian Paus Pius IX, 1878. Refleksi yang diadakan dalam periode ini belum cukup matang. Sebab kebanyakan tindakan yang dimajukan tidak jauh berkisar soal aksi sosial-karitatif. Aksi ini kendati acap kali diserang habis-habisan sebagai bentuk lain dari usaha mempertahankan *status quo*, bahkan dipandang sebagai pelestarian pembodohan massa dengan cara-cara yang tidak memberdayakan, namun sesungguhnya aksi ini tidak tergantikan. Di kelak kemudian hari akan terbukti bahwa orang-orang sederhana (yang banyak menjadi korban keserakahan) sungguh diselamatkan melalui aksi-aksi sosial-karitatif. Para pelaku aksi tersebut kemungkinan sangat besar tidak berpretensi untuk melakukan perubahan-perubahan substansial

dan struktural dalam masyarakat. Tetapi sentuhan dan kasih kemanusiaan sungguh dirasakan melalui aksi tersebut.

Tahun-tahun pertama Paus Leo XIII (1878-1903), hingga tahun penerbitan *Rerum Novarum*, 1891 ditandai oleh kepedulian serta keterbukaan Bapa Suci pada masalah-masalah yang menjerat wilayah tanggung jawabnya sebagai penggembala dalam Gereja Kristus. Pada kurun waktu ini berlangsung hangat diskusi tentang pokok-pokok yang disebut ajaran sosial Kristiani. Didiskusikan saat itu legitimasi doktrin sosial Gereja, arti, dan keterbatasannya.[29] Tetapi pada zaman ini belum ditemukan sarana tepat untuk mengikis praksis dari sebuah mentalitas paternalistik, meski sudah diakui kesamaan dan hak para buruh.

Dari *Rerum Novarum* hingga kurun waktu dewasa ini ada proses pematangan konsep dan prakarsa-prakarsa efektif, kendati terlambat, misalnya dengan menerima *Trade Unions* (Serikat Buruh) dan resistensi kaum buruh terhadap kapitalisme. Dalam konteks ini hanya akan disebutkan beberapa nama, misalnya Frédéric Antoine Ozanam (1813-1953), bersama dengan kelompok Vincentius a Paulo (1581-1660), keduanya di Paris. Di Jerman bertebaran *Gesellenvereine* yang dirintis oleh Adolf Kolping (1813-1865); para Jesuit: Carlo Maria Curci, Matteo Liberatore, Taparelli d'Azeglio yang menebarkan ide-ide mereka di «*Civiltà Cattolica*», yang didirikan tahun 1850.[30] Berikut ini merupakan usaha menyintesiskan secara garis besar kontribusi pemikiran tokoh-tokoh tersebut di atas.

Subordinasi ekonomi pada bidang moral, harta milik berfungsi sosial, negara perlu campur tangan dalam masalah-masalah sosial, perserikatan orang-orang seprofesi. Gema yang paling mengesankan adalah apa yang menjadi visi serta yang dilakukan oleh W.E. von Ketteler,[31] yakni Gereja berhak dan berkewajiban untuk campur tangan dalam masalah sosial. Sebab masalah sosial adalah juga masalah moral. Mulanya Ketteler menganjurkan adanya koperasi produksi (yang berbeda dengan usulan Ferdinand Lassalle[32]), yang meminta bantuan modal pada Pemerintah.

Akan tetapi Ketteler kemudian mengetuk kemurahan hati orang kaya untuk menyokong orang miskin dengan memberi modal. Pandangan ini kemudian disempurnakannya sendiri, dan menjadi lebih realistis.[33] Ia tidak saja menuntut agar pemerintah mengatur perundang-undangan tentang perburuhan menyangkut pengurangan jumlah jam kerja, penambahan upah kerja, perlindungan terhadap buruh wanita dan anak-anak, dan lain sebagainya, juga berjuang di parlemen (*Reichstag*). Ditegaskannya, *Wollen wir also die Zeit erkennen, so müssen wir die sociale Frage zu ergründen suchen. Wer sie begreift, der erkennt die Gegenwart, wer sie nicht begreift, dem ist Gegenwart und Zukunft ein Räthsel*.[34] Masalah-masalah sosial, dan salah satu di antaranya adalah masalah buruh, pada prinsipnya adalah masalah moral, masalah orang-orang yang pada hakikatnya berciri sosial, tetapi dalam perkembangan industri mereka telah kehilangan sosialitas

mereka. Tegasnya, *Ohne Religion und Sittlichkeit gibt es keine Wohlstand*. Maksudnya, kesejahteraan (umum) tidak mungkin tercapai tanpa mengikutsertakan agama dan (pertimbangan-pertimbangan) hati nurani. Dengan demikian, penanganan masalah sosial itu senantiasa menyangkut *depositum fidei*. Penegasan dan keyakinan ini saja tidak cukup! Untuk itu, ia menyusun program sosial-politik dan religius demi memecahkan masalah sosial dan membuka peluang bagi Negara untuk intervensi. Ide-ide Ketteler ini dilanggengkan oleh *Deutsche Zentrumspartei* (Partai Zentrum Jerman).[35]

3.3. Kubu Sosial Kemudian (Sampai Tahun 1891)

Karl von Vogelsang (Mazhab Wina) mengamati dengan cermat lalu memperkembangkan gagasan Wilhelm Emmanuel von Ketteler yang berhubungan dengan asosiasi-asosiasi buruh, terutama dari perusahaan sejenis. Secara lugas dirumuskan begini,

> Ketteler's most decisive mental step was to recognise that both the State, through intervention, and the workers, through association, were, in combination, the only effective means of had come to be defined. He soon began to defend the right fo the workers to better conditions and to higher wages. He also affirmed the right of the workers to strike, which he regarded as the prinsipal weapon of the trade unions in their struggle with large industry and capital.[36]

Selain itu, perkenalannya dengan René de La Tour du Pin (teorikus kenamaan tentang Katolik-Sosial di Prancis) telah memberanikan Mazhab Wina untuk mencetuskan Deklarasi Haid (Pilsen, Bohemia) 1883, yang mengarah pada korporativisme (baca: Perserikatan Buruh). Dengan Deklarasi Haid di sini dimaksudkan suatu kesepakatan bersama para pemikir yang mengedepankan unsur-unsur sosio-politik, dan religius serta ekonomi berkenaan dengan perkembangan teknonologi dan industrialisasi, yang mesti memberi tempat pada fungsi dan peran para buruh dan keluarganya. Unsur-unsur yang terlibat di dalamnya tidak saling mengklusikan, sebaliknya, unsur-unsur itu saling tergantung. Menarik untuk disimak, bahwasanya sedikit demi sedikit pihak Gereja melepaskan diri dari anggapan primordial yang menyatakan korporativisme bakal mempersubur dan membantu proses kelahiran peran kekuatan politik dalam seluruh kerangka perjuangan perbaikan "nasib" kaum buruh.

Di Prancis (sekolah Angers) sebaliknya berkembang arus dan kecenderungan yang lebih konservatif. Juru bicara sekolah ini adalah Mgr. Charles-Émile Freppel (1827 – 1891). Timbul kesan sangat kuat bagaimana Mgr. Freppel berjuang gigih untuk membela primat paus yang nantinya mengajarkan pokok-pokok terpenting berkenaan dengan keterlibatan sosial dan politik. Tanpa ragu beliau mengorganisasi imam-imam yang rela melayani para tahanan "politik" Prancis di Jerman. Loyalitas

beliau yang sangat tinggi pada Gereja Roma membuat beliau tanpa beban memerankan tugas kenabiannya melalui khotbah-khotbahnya yang tegas dan visioner.

Di Amerika Utara, Uskup Agung Baltimore, James Kardinal Gibbons (1834 – 1921) membela *The Knights of Labor*, yang menjamin kemungkinan adanya perserikatan buruh Kristen. *The Knights of Labor*, yang merupakan suatu organisasi buruh Katolik yang didirikan oleh Terrence V. Powderly (+ 1924), pernah ditolak dan dikecam habis-habisan di Kanada sebagai pengejawantahan dari "semacam *freemasonry*". Powderly (penggagas *The Knights of Labor*) berusaha keras untuk meyakinkan bahwa Uskup-Uskup Amerika yang adalah anggota resmi *The Knights of Labor* (persekutuan buruh Amerika terbesar yang pertama), sangat sesuai (kompatibel) dengan apa artinya menjadi Katolik. Tetapi sebagian terbesar uskup-uskup Amerika Serikat yang menerima bahwa anggota *the Knight* bukanlah orang-orang anti-Katolik tetapi pertama-tama suatu perserikatan buruh, umumnya bersikap penuh empati pada organisasi, yang memang menyimpan kekuatan politis yang dahsyat.

James Kardinal Gibbons menyampaikan suatu pernyataan tertulis kepada Takhta Suci di Roma, yang di dalamnya diungkapkan sikap Kardinal secara personal, yakni mendukung sepenuhnya perserikatan ini. Itulah sebabnya Takhta Suci kemudian mengecualikan organisasi tersebut dari kecaman. Sudah disadari sejak awal sebelum berdirinya organisasi ini, bahwasanya satu-satunya faktor yang menjamin kekatolikan serta kemurnian gerakan ini adalah relasi tak terceraikan antara organisasi dengan Gereja Katolik, sehingga "Kekatolikan" menjadi identitas yang diperjuangkan dan dijaga serta menjadi karakter dominan dari organisasi ini.[37] Campur tangan Kardinal Manning di Inggris didengarkan oleh otoritas sipil. Ia membela para buruh Irlandia (yang hampir semua beragama Katolik) yang bekerja di Inggris. Karya Mgr. Mermillod dalam pertemuan di Freiburg membangkitkan kesadaran baru di dalam Gereja, khususnya terhadap masalah-masalah sosial.[38]

Jadi, secara sporadis muncul kesadaran baru tentang kondisi sosial, politik, ekonomi, dan religi yang memotivasi praksis berdampak luas dan mendalam. Akan tetapi itu tidak berarti di dalam Gereja hanya ada satu suara. Sebab pengaruh diskusi antara golongan konservatif dan liberal di dalam Gereja mewarnai seluruh sikap 'perutusan' Gereja terlebih di antara orang miskin, kendati mereka ini sangat menentukan. Memang tidak dapat disangkal, Gereja mengesankan meninggalkan, dan membiarkan mereka berjuang sendirian, sehingga mereka jatuh ke paham dan aliran politik yang dari belakang menusuk Gereja. Dari data historis yang tersedia, tidak begitu nyata sikap lembaga resmi Gereja terhadap liberalisme kapitalisme. Hal itu biasanya dikaitkan antara lain dengan sikap para kapitalis yang umumnya bermurah hati pada Gereja dan memberikan sumbangan yang bercorak sosial karitatif untuk membantu mengatasi keadaan sosial warga "kelas bawah" yang umumnya miskin. Sementara itu, dengan sangat jelas lembaga Gereja bersikap tegas

dan keras terhadap sosialisme yang sangat cenderung mengarah pada penolakan terhadap agama dan kepercayaan kepada Allah.

4. *Rerum Novarum*: Tonggak Sejarah ASGK

Intervensi Paus Leo XIII dalam masalah sosial dengan menerbitkan ensiklik *Rerum Novarum* (15 Mei 1891) menutup periode kedua gerakan sosial Katolik. Intervensi ini terasa sekali sangat signifikan, dengan akibat diperhatikan oleh para pengambil keputusan politik, pembuat dan pelaksana hukum, pelaku ekonomi, dan para tenaga kerja yang secara langsung menyangga dampak buruk suatu masalah di bawah terminologi *masalah sosial*. Perihal Leo XIII (1878 - 1903) dikatakan,

> '.... Leo's main achievement was his attempt within the framework of traditional teaching, to bring the church to terms with the modern age. At the same time he made no sharp break with Pius IX, whose policies he continued in serveral fields. For example, his attacks on socialism, communism, and nihilism in *Quod apostolici muneris* (28 Dec. 1878), or on Freemasonry in *Humanum genus* (20 Apr. 1884), as his treatment of marriage in *Arcanum illud* (10 Febr. 1880), could have come from Pius's pen. .... His most famous manifesto, *Rerum Novarum* upheld private property, but also the just wage, workers' rights, and trade unions; its advocacy of social justice earned him the title of 'The workers' Pope.'[39]

Rerum Novarum (*RN*) juga mengawali suatu periode baru. Leo XIII dalam hal tertentu memiliki pengalaman yang lebih luas ketimbang Pius IX. Sebab ia berkontak langsung dengan masalah sosial, ketika ia ditugaskan sebagai *Nuntius* di Belgia, 1843-1846. Kemudian ia dipindah ke London, Inggris. Ketika menjalani tugasnya sebagai uskup Perugia ia tetap menjaga hubungan baik dengan para intelektual di pelbagai negeri. Dalam beberapa surat gembalanya, khususnya tahun-tahun terakhir sebagai uskup, ia memfokuskan pembicaraan pada masalah aktual saat itu. Tentu saja, di sini ia tidak menampilkan pemikiran yang sungguh orisinil. Ia pun tidak berdiri jauh dari garis tradisional. Tetapi ia dikarunia kemampuan untuk mendengarkan dan menerima para pengunjungnya, serta mematangkan gagasan-gagasannya menjadi sintesis. Seringkali ia mengolah masukan sendiri, tanpa diketahui oleh sekretarisnya.

Pada tahun-tahun pertama pontificatnya, tenaganya tercerap nyaris habis oleh masalah-masalah politis, misalnya: masalah Roma [*the Roman Question*], konflik diplomatik dengan Jerman, situasi Prancis. Tetapi ia menyadari sepenuhnya bahwa Gereja sedang berhadapan dengan masyarakat modern.[40] Ia juga mengikuti dengan penuh perhatian diskusi-diskusi dari pelbagai kalangan sosiolog Katolik; menerima para peziarah Prancis, yang dipimpin oleh Léon Harmel. Pada awal tahun 1888 ia menegaskan kepada para anggota Serikat bahwa ia sedang mempersiapkan suatu dokumen tentang masalah sosial. Peredaksian ensilik *Rerum Novarum* melewati tiga tahap: redaksi pertama dipersiapkan oleh P. Liberatore (tahun 1890). Bersama dengan Kardinal Zigliara, P. Liberatore menggarapnya lagi. Hasil kerja mereka ini kemudian

dikoreksi oleh P. Liberatore dan Kardinal Mazzella. Dokumen kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sekretaris paus, Mgr. Boccali dan Volpini.[41] Setelah Paus memperbaiki beberapa *celah* akhirnya dokumen dipublikasikan, 15 Mei 1891.

Ajaran *Rerum Novarum* dapat disingkat dalam beberapa hal hakiki. Ditegaskan kembali hukum kodrat atas hak milik, dan digarisbawahi fungsi sosial hak milik. Maksudnya, dari kodratnya (asal-usul dan rencana untuk apa manusia diciptakan dan disayangi oleh Allah) manusia perlu mengembangkan diri. Untuk melaksanakan "tugas panggilan" itu, manusia perlu dilengkapi (secara konstitutif dan mutlak perlu) materi, yang kendati bersifat fana, namun manusia tidak bisa tidak memerlukannya. Oleh karena itu, hak untuk memiliki termasuk inheren dan melekat di dalam diri manusia tersebut. Dengan kata lain, hak milik diakui dan dijunjung tinggi keberadaannya. Prinsip ini jelas-jelas melawan dan berseberangan dengan paham sosialisme-komunisme.[42]

Menjadi tugas negara pertama-tama memajukan dan menciptakan kemungkinan yang nyata tercapainya kesejahteraan umum (*bonum commune*) dengan menepis absensi negara sebagaimana diajarkan oleh kaum liberal (Mazhab Manchester), tetapi ada juga tempat bagi kebijakan dan kegiatan negara, yang harus selalu memiliki ciri mendukung, memelihara, mengayomi. Absensi negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan umum yang adil dan merata menghilangkan asas legalitas negara. Sebab negara justru disepakati dan didirikan untuk menjamin terwujudnya kepentingan bersama.

Diingatkan kepada para buruh kewajiban-kewajiban mereka terhadap para pengusaha (majikan), tetapi juga diperlihatkan bahwa mereka harus mendapat perlakuan adil. Hal ini menyangkut misalnya: upah kerja yang mencukupi untuk menjamin terwujudnya hidup layak manusiawi. Fakta ini tentu saja berlawanan dengan paham pekerjaan yang semata-mata ekonomis. Di sini hendak ditekankan paham kerja yang lebih manusiawi dan personal. Inilah dimensi moral dari kewajiban tersebut.

Perjuangan dan persaingan antar-klas dikecam, tetapi diakui adanya hak para buruh untuk berserikat demi mempertahankan hak-hak mereka. Persaingan antar-klas tidak jarang memancing tindak kekerasan, yang saling menghancurkan dan meniadakan. Berkenaan dengan maksud perjuangan kaum buruh, yakni memperoleh upah yang adil dan layak manusiawi, dimaksudkan sebagai perolehan pendapatan yang cukup untuk membiayai hidup – keluarga, bukan hanya atas dasar kerja semata-mata. Kontrak itu sah-sah saja, akan tetapi harus memperhatikan asas keadilan. Diperbolehkan pula adanya perserikatan-perserikatan yang dibentuk semata-mata oleh dan untuk kaum buruh.

Dengan kata lain, *RN* mengumpulkan sekitar lima puluh hasil studi dan diskusi yang meliputi antara lain Khotbah-khotbah Emmanuel von Ketteler pada masa Adven di Katedral Mainz, 1848; Pidato-pidato Mermillod di St. Clotilde di Paris; Inisiatif Leon Harmel dan *Opera dei Congressi;* Deklarasi Haid dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diambil oleh Serikat Freiburg dan Liegi, tahun 1890; Campur tangan Manning dalam pemogokan di London dan intervensi Gibbons demi

mendukung *The Knights of Labor;* Assosiasi yang bantu-membantu (korporativisme) *a la* Vogelsang (Mazhab Wina) dan La Tour du Pin (Paris) dan mula pertama yang tidak begitu jelas tentang Serikat Buruh Kristen.[43]

Dalam kenyataannya, *Rerum Novarum* tidak saja mengatasi «dogma-dogma» ekonomi liberal, tetapi juga mengakui secara sah kedudukan orang-orang Katolik, yang dipandang oleh kaum konservatif sebagai sosialis. Dalam *Rerum Novarum* Paus Leo XIII mengakui legitimasi gerakan dan serikat buruh. Pengakuan ini merupakan *spirit* yang dihembuskan oleh *The Knights of Labor*. Dalam konteks ini pula, Gereja merasa perlu berbicara karena masalah buruh menyangkut langsung kesusilaan (moral) dan dengan demikian juga iman. Tegasnya, Gereja merasa wajib memberikan ajaran yang dapat memandu dan mendampingi pelaku-pelaku perubahan dalam masyarakat, terutama kaum pekerja (buruh dan keluarganya).

Tetapi akan menjadi jelas bahwa ajaran Gereja bukanlah jalan tengah di antara sosialisme (komunisme) dan liberalisme (kapitalisme). Sebab jika demikian, ajaran Gereja jatuh ke dalam ideologi. Secara diplomatis tujuan Gereja dirumuskan antara lain sebagai berikut *to evangelize, not to civilize. If it does civilize, it is done through evangelizing*.[44] Maksudnya, lembaga Gereja Katolik bertujuan untuk melakukan penginjilan, pewartaaan Kabar Gembira tentang Allah yang mengerjakan karya-karya agung dan yang mencintai manusia serta segenap ciptaan-Nya melalui peristiwa Yesus Kristus yang dihadirkan oleh Gereja yang menyejarah karena dihidupkan oleh Roh Kudus-Nya. Jadi, lembaga Gereja dimaksudkan untuk membuat dan menciptakan peradaban (baru). Kalau pun terjadi peradaban, maka peradaban itu pun ditempuh melalui penginjilan. Dengan demikian tidak ada peradaban yang sama sekali terpisah atau terlepas dari karya penginjilan.

Jika hipotesis ini benar, maka *The Knights of Labor* sekali lagi menyumbangkan sesuatu yang sangat penting dalam sejarah ide-ide dan sejarah Gereja. Benarlah, bahwa paus membatasi diri dengan menempatkan Serikat Buruh setara dengan korporasi, tanpa menunjukkan suatu spesifikasi. Tetapi fakta sederhana ini menandai suatu kemenangan pihak katolisisme sosial, yakni dalam format sindakalisme di atas korporativisme. Hal ini berarti bahwa Gereja sanggup menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang mendesak. Gereja dengan demikian juga menginkarnasikan ajaran agama Kristen dalam struktur-struktur baru zamannya, *menerima bagian yang benar dari gagasan Marxis*. Misalnya, distingsi antara perjuangan klas yang berlangsung terus dengan tindakan sah beresistensi untuk membela hak-hak pribadi; ada klas-klas dalam masyarakat, tetapi menolak konflik antar-klas; kemiskinan yang disebabkan oleh struktur yang tidak adil. Selain itu, negara juga perlu campur tangan dalam masalah sosial, terutama demi melindungi kaum lemah (buruh) dari (neo) liberalisme yang kejam. Secara implisit diakui pula upaya perjuangan Serikat Buruh, misalnya (hak untuk mengadakan) pemogokan (sebagai salah satu jalan terakhir yang sah) yang masih dipandang tidak sesuai dengan asas moral.

Akhirul kalam, intervensi lembaga Gereja Katolik dalam masalah-masalah sosial, khususnya dalam masalah buruh, melalui ajaran sosial berangsur-angsur menjadi matang, kendati bukan tanpa resistensi dan perlawanan khususnya pada masa kepemimpinan Bapa Suci Pius X. Eksplisitasi organis dan logis yang diturunkan dari prinsip-prinsip umum yang ditegaskan dalam *Rerum Novarum* (yang berbeda dengan dokumen-dokumen Bapa Suci Gregorius XVI dan Pius IX tentang kebebasan) ini merupakan jasa abadi *Paus Kaum Buruh*, Leo XIII.****

A. Eddy Kristiyanto

Guru Besar bidang Sejarah Gereja dan Dosen pada Program Studi Teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta; E-mail: ekristiyanto@gmail.com

Catatan Akhir:

1 Ajaran Sosial Gereja Katolik merupakan terjemahan dari *Catholic Social Doctrine*, yang acap kali dipakai dalam diskursus publik dengan istilah Doktrin Sosial Gereja (*Social Doctrine of the Church*), atau *Catholic Social Teaching*. Barangkali yang lebih netral adalah *discorso sociale della Chiesa Cattolica,* yang berarti Diskursus Sosial Gereja Katolik.

2 Kerangka dasar naskah naskah ini diinspirasikan oleh karya Giaccomo Martina, *Chiesa nell'età dell'assolutismo, del liberalismo, del totalitarismo,* Jilid IV, *L'età del totalitarismo,* Morcelliana, Brescia ^{6}1987, yang salah satu bagiannya berbicara tentang masalah sosial.

3 Ada sekian banyak karya yang mengulas situasi sosial ini. Di sini hanya dirujuk satu dua karya yang langsung bersinggungan dengan pokok yang dibahas misalnya, C. Charle, *Histoire Sociale de la France au XIX e siècle;* J. Kocka. *Sozialgeschichte*.

4 Fenomena itu diangkat dalam studi Hofmann. *Ideengeschichte der sozialen Bewegung*; F. Engels, *The Condition of the Working Class in England*; L. Chevalier, *Classes laborieuses et Classes dangereuses à Paris*; T.S. Ashton, *The Industrial Revolution 1760-1830*; P. Deane, *The First Industrial Revolution*.

5 Buku klasik dan handal yang lahir dari studi J.H. Clapham, *The Economic Development of France and Germany*.

6 Pauperisme berasal dari kata "pauper-pauperis" (bahasa Latin), yang berarti miskin. Di sini terma itu secara simpel berarti himpunan massa yang hidup dalam kondisi yang relatif tidak manusia, terutama karena ketiadaan sarana yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer, seperti sandang, pangan, papan (rumah), pendidikan, kesehatan, informasi.

7 F. Engels, *The Condition of the Working Class in England*.

8 E. Sagara, *An Introduction to Nineteenth Century Germany*, 65-85.

9 J.H. Clapham, *The Economic Development of France and Germany* , 6-52.

10 Prof. Toynbee wafat tahun 1833 dalam usia 30 tahun, tetapi rangkaian kuliahnya berpengaruh sangat besar pada murid-muridnya. Dalam tahun 1884 mereka ini menerbitkan rangkaian kuliah tersebut di bawah judul *Lectures on the Industrial Revolution in England*. Publikasi ini merupakan catatan-catatan mereka dari perkuliahan yang diberikan Toynbee di Oxford. Titik tolak revolusi industri bagi Toynbee adalah tahun 1760, saat untuk pertama kalinya ditemukan teknologi mesin uap dan diterapkannya dalam proses produksi, terutama industri kain. Tetapi J.U. Nef menegaskan bahwa bangkitnya industrialisasi di Inggris merupakan proses yang lama dan halnya dapat dilacak ke pertengahan abad ke-17 dan akhirnya menjadi fenomen yang *triumfalistis* pada akhir abad ke-18. Lihat J.U. Nef, *Economic History Review,* [1934], yang kemudian dicetak ulang dalam E.M. Carus-Wilson, *Essays in Economic History.* Vol. 2. London, Edward Arnold Publishers Ltd., 1966.

11 Rostow menegaskan bahwa kurun waktu 1782-1802 merupakan *the great watershed in the life of modern societies.* Inilah periode yang ditetapkannya sebagai *lepas landas menuju pertumbuhan* bagi ekonomi Inggeris. Sejauh penemuan alat-alat teknologi dan industri itu membawa perubahan perekonomian [dan dengan demikian juga pola hidup dan politik], maka saat itulah revolusi industri menjadi faktor

determinan bagi masyarakat. W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth*.

[12] Lihat J. Godechot, *Le Rivoluzioni (1770-1799)*.

[13] T.S. Ashton, *The Industrial Revolution* , 48.

[14] Paparan yang jelas dengan ungkapan-ungkapan yang lugas berkenaan dengan pengaruh dan pengembangan ajaran tokoh-tokoh tersebut dalam dunia perekonomian, dan terutama dalam kehidupan masyarakat dapat ditemukan antara lain dalam Harrison, *Early Victorian Britain 1832-51*.

[15] Baca W.D. Grampp, *The Manchester School of Economics*. Stamford – London, Stamford University Press – Oxford University Press, 1960.

[16] Pemerintah *Inggris* baru pada tahun 1802 menerapkan kebijakan intervensi dengan melarang mempekerjakan buruh lebih dari 10 jam/hari. Pada tahun 1819 ditetapkan larangan bagi anak-anak di bawah 10 tahun untuk bekerja di pabrik. Ketentuan yang sama berlaku di *Prusia* pada tahun 1830; di *Prancis* baru pada tahun 1841 dipastikan secara yuridis bahwa buruh yang berusia 8 - 12 tahun bekerja 8 jam/hari. Mereka yang berusia 12 tahun bekerja antara 12 - 16 jam/hari.

[17] Bahasan tentang liberalisme dapat dibaca dalam O. Chadwick, *The Secularization of the European Mind*, 21-47; J.J. Sheehan. *German Liberalism in the Nineteenth Century*; M. Schmidt – G. Schwaiger (Hrsg), *Kirche und Liberalismus im 19. Jahrhundert*.

[18] Baca misalnya A.S. Lindemann, *A History of European Socialism*; P. Misner, *Social Catholicism in Europe*; W. Charlton, cs., *The Christian Response to Industrial Capitalism,* 164-192.

[19] Lihat karya K. Marx – F. Engels, *Manifesto of the Communist Party*.

[20] Proudhon menegaskan, *La propriété, c'est la vol!* Artinya, hak milik itu pencurian. Pandangan ini dinyatakan dan diuraikan dalam karyanya *Qu'est-ce que la propriété? Ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernment*. 1840.

[21] Lihat A. Eddy Kristiyanto, "Pergumulan Gereja Sekitar Masalah Buruh".

[22] Cfr. A. Gambasin, *Il movimento sociale nell'opera dei congressi (1874-1904)*. Dilaporkan bahwa pada tahun 1874 ada Seksi Amal Kasih; 1879 ada Seksi Amal Kasih dan Ekonomi Katolik; 1887 ada Seksi Ekonomi Sosial Katolik.

[23] Dokumen ini memuat 85 (Delapan Puluh Lima) kesalahan-kesalahan zaman modern. Teks selengkapnya dapat ditemukan antara lain dalam Appendix, di bawah judul *Pope Pius IX: Syllabus of Errors, 8 December 1864*, (from *The Dublin Review*, LVI (1865), 513-529). Teks selengkapnya ada dalam C.J. Barry (ed.), *Readings in Church History.*

[24] C.J. Barry (ed.), *Readings in Church History.*

[25] 'La questione dei rapporti fra ricchi e poveri che preoccupa tutti gli economisti sarà ben fermo e accettato per vero che la povertà non manca di dignità; che il ricco deve essere misericordioso e generoso e il povero contento della propria sorte e del proprio lavoro; dato che né l'uno né l'altro è nato per questi beni perituri, il primo deve guadagnarsi il cielo con la pazienza, l'altro con la liberalità.' Leo XIII. *Acta*. III. Romae, 1884, 154. Teks tersebut sedemikian terkenal, sehingga sebaik-baiknya saya terjemahkan untuk konsumsi sidang pembaca Indonesia: *Masalah tentang hubungan-hubungan antara orang-orang kaya dan miskin yang mencemaskan semua ekonom akan diterima dengan bulat sebagai benar bahwasanya kemiskinan itu tidaklah kurang bermartabat; bahwa orang kaya harus menjadi lebih berbelas kasih dan murah hati dan orang miskin harus menjadi gembira karena keadaannya dan atas pekerjaannya sendiri; diberikan kepada yang satu dan yang lain dilahirkan untuk kekayaan abadi ini, yang satu harus memperoleh surga dengan kesabaran, yang lain memperoleh surga dengan pembebasan.*

[26] http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_20061888_libertas_en.html. Diakses, Senin, 5 Maret 2012, pk. 21.05.

[27] Inilah karya pertama yang dihasilkan oleh Mgr. Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Karya Uskup Mainz pada tahun 1849, yang merupakan kumpulan khotbah yang disampaikannya di Katedral Mainz pada masa Adven (1848), ketika itu beliau masih menjabat sebagai pastor paroki miskin di Hopsten. Karya yang dimaksudkan di sini adalah *Die großen socialen Fragen der Gegenwart. Sechs Predigten gehalten im hohen Dom zu Mainz*. Mainz, 1849. Khotbah Ketteler ini acap kali dipandang sebagai tandingan pemikiran revolusioner yang dilontarkan oleh K. Marx – F. Engels, *Manifesto of the Communist Party* (Authorized English Translation. Edited and Annotated by Frederick Engels), London: William Reeves, 1988.

[28] Cfr. A. De Gaspari. *I tempi e gli oumini che prepararono la "Rerum Novarum"*, 30 ss.

[29] Dokumen-dokumen kepausan yang nantinya akan terbit mengungkit kasus yang sama, misalnya *Mater et Magistra, Populorum Progressio* menggunakan artian sempit; menegaskan kompetensi Gereja untuk memaklumkan prinsip-prinsip panduan, sambil memberikan kewenangan kepada kaum awam untuk melaksanakannya. Sebaliknya, *Octogesima Adveniens* menegaskan (artikel 4) bahwa Takhta Suci tidak memiliki kompetensi untuk mengusulkan pemecahan-pemecahan yang berlaku secara universal. Cfr. B. Sorge. 'È superato il concetto tradizionale di dottrina sociale della Chiesa?' Dalam *Civiltà Cattolica* (1968, I): 423-436.

[30] P. Droulers, *Cattlolicesimo sociale nei secoli XIX e XX*, 120 ss.

[31] *Die großen socialen Fragen der Gegenwart. Sechs Predigten gehalten im hohen Dom zu Mainz.* Mainz 1849; *Die Arbeiterfrage und das Christenthum*. Mainz, 1864; *Die Katholiken im Deutschen Reiche. Entwurf zu einem politischen Programm*. Mainz, 1873. Lihat E. Iserloh (Hrsg). *Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1811-1877*.

[32] Cfr. F. Lassale, *Ausgewählte Reden und Schriften 1849-1864*.

[33] Arti penegasan tersebut kurang lebih sebagai berikut, jika kita bermaksud mengerti dan memahami zaman kini, mestinya kita mendasarkan pencarian kita pada masalah-masalah sosial. Jika kita berhasil menangkapnya berarti kita mengenali zaman sekarang ini. Akan tetapi jika kita tidak berhasil mengerti masalah-masalah sosial zaman ini, maka saat sekarang ini dan masa depan menjadi teka-kita, di mana kita terus-menerus menebak-nebak. Lihat A. Eddy Kristiyanto, *The Workers' Bishop: W.E. von Ketteler (1811-1877). A Study of Ketteler's Vision and Practise in Responding to the Labour Question in the Light of Christianity*. Dissertation. (Facoltà di Storia Ecclesiastica). Roma, Università Gregoriana, 1996.

[34] W.E. von Ketteler, *Die großen socialen Fragen der Gegenwart. Sechs Predigten gehalten im hohen Dom zu Mainz,* Mainz 1849, 17; juga W.E. von Ketteler, *Sämtliche Werke und Briefe.* Hrsg. E. Iserloh et al., I,1, Mainz 1977, 35.

[35] Baca Morsey, *Der Untergang des politischen Katholizismus.*

[36] John Molony, *The Worker Question,* 20.

[37] Karakter ini dapat kita simak dalam kutipan surat kepada Uskup Agung P.J. Ryan, 24 Oktober 1884: "Through a lack of knowledge of our principles, or through the rash utterances of some person representing himself as a member, we have been stigmatized once or twice as Communists, or Anarchists, against such doctrines I have always set my face...."

[38] Lihat G.F. Grogan, *The Noblest Agitator. Daniel O'Connell and the German Catholic movement 1830-50;* M. Schäfers. "*Rerum Novarum – The Result of Christian Social Movements 'From Below'". Concilium.* (Edited by J. Coleman – G. Baum), 1991/5. London – Philadelphia, SCM Press – Trinity Press International, 3-17.

[39] Cfr. J. Molony, *The Worker Question,* 60 ss.

[40] Sejumlah dokumen resmi Paus XIII berikut ini memperlihatkan kepeduliaannya yang sangat besar pada masalah-masalah mendesak zamannya. Misalnya ensiklik *Diuturnum*, (29 Juni 1881) perihal Asal-Usul Kekuasaan Sipil; *Immortale Dei* (I November 1885) perihal Konstitusi Negara-Negara Kristen; *Libertas Praestantissimum* (20 Juni 1888) perihal kodrat kebebasan insani. Semua ensiklik ini saling melengkapi dan menyeimbangkan kecaman-kecaman yang dilakukan oleh Paus Pius IX terhadap modernitas, yang nantinya ekses modernitas itu disempurnakan dalam sosok modernisme yang oleh Pius X dinilai sebagai induk dari segala kesesatan.

[41] Lihat A. de Gasperi, *I tempi e gli oumini che prepararono la "Rerum Novarum".*

[42] Cfr. M.J. Schuck. "The Ideological Uses of Catholic Social Teaching". *Concilium.* (Edited by J. Coleman – G. Baum). 1991/5. London – Philadelphia, SCM Press – Trinity Press International, 47-54.

[43] Lihat hasil studi yang sangat inspiratif berkaitan dengan pokok ini: R. Aubert, *Catholic Social Teaching: An Historical Prespective.* (Edited by David A. Boileau; Preface: Charles E. Curran). Milwaukee, WI., Marquette University Press, 2003. Diperlihatkan di sini esensi yang hampir selalu diperjuangkan sepanjang sejarah ASGK, yang berhubungan dengan dua prinsip antropologis yang sangat mendasar, yakni martabat atau kesucian pribadi insani, dan sifat sosial pribadi manusia.

[44] Dikutip dari H. Carrier, *The Social Doctrine of the Church Revisited. A Guide for Study,* Vatican City 1990, 30. Selain itu perlu ditegaskan di sini, bahwa *de facto* Gereja mengklaim tidak memiliki kompetensi dalam tata sosial, ekonomi, politik dan teknologi. Peran Gereja yang hakiki terletak dalam bidang moral dan religi. Bdk. *Gaudium et Spes* (Konsili Vatikan II), artikel 42.

Daftar Pustaka

Ashton T.S.,

1989 *The Industrial Revolution 1760-1830*. Oxford – New York, Oxford University Press.

Aubert R.,

2003 *Catholic Social Teaching: An Historical Prespective*. (Edited by David A. Boileau; Preface: Charles E. Curran). Milwaukee, WI., Marquette University Press.

Barry C.J. (ed.).,

1985 *Readings in Church History*. Westminster, Maryland, Christian Classics, Inc.

Carrier H.,

1990 *The Social Doctrine of the Church Revisited. A Guide for Study*. (Pontifical Council for Justice and Peace), Vatican City.

Chadwick O.,

1996[2] *The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century*. (Canto Original Series). New York – London: Cambridge University Press.

Charle Ch.,

1991 *Histoire sociale de la France au XIXe siècle*. Paris, Éditions du Seuil.

Charlton W. – T. Mallinson – R. Oakeshott,

1986 *The Christian Response to Industrial Capitalism*. London, Sheed & Ward.

Chevalier L.,

1984 *Classes laborieuses et Classes dangereuses à Paris, pendant la première moitié du XIXe siècle*. Paris, Éditions du Seuil.

Clapham J.H.,

1921 *The Economic Development of France and Germany 1815-1914*. Cambridge, At the University Press.

Deane P.,

1990[2] *The First Industrial Revolution*. Cambridge – New York – Sydney, Cambridge University Press.

Droulers P.,

1982 *Cattolicismo sociale nei secoli XIX e XX. Saggi di storia e sociologia*. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura.

Eddy Kristiyanto A.,

2001 "Pergumulan Gereja Sekitar Masalah Buruh: Belajar dari Sejarah". Dalam J.B. Banawiratma (ed). *Gereja Indonesia, Quo Vadis. Hidup Menggereja Kontekstual*. Yogyakarta, Kanisius, 165-180.

2002 "Gereja di Hadapan Masalah Buruh. Studi Ringkas dengan Matra Teologi Historis". Dalam *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*. Vol. 1, No. 1, Januari, 72-82.

2005 *Diskursus Sosial Gereja Sejak Leo XIII*, Malang, Dioma.

Engels F.,

1991 *The Condition of the Working Class in England. From Personal Observation and Authentic Sources.* (Introduction by Eric Hobsbawm). London – Glasgow – Toronto, Grafton Books, (1844), 1887 (New York).

Gambasin A.,

1958 *Il movimento sociale nell'opera dei congressi (1874-1904): Contributo per la storia del cattolicesimo sociale in Italia.* Romae, Apud Aedes Universitatis Gregorianae.

Gasperi A.,

1984 De. *I tempi e gli oumini che prepararono la "Rerum Novarum"* (Premessa di Giulio Andreotti). Milano, Vita e Pensiero, Pubblicazioni della Università Cattolica.

Godechot J.,

1989 *Le Rivoluzioni (1770-1799).* (Traduzione dal francese e aggiornamento bibliografico a cura di Bianca Valota Cav allotti e Stefano Nutini). Milano, U. Mursia editore.

Harrison J.F.C.,

1988 *Early Victorian Britain 1832-51.* London, Fontana Press.

Hoffmann W.,

1971 *Ideengeschichte der sozialen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts.* Berlin: de Gruyter.

Iserloh E. (Hrsg.).,

1990 *Wilhelm Emmanuel von Ketteler 1811-1877.* Paderborn etc., Ferdinand Schöningh.

Kiesewetter H.,

1989 *Industrielle Revolution in Deutschland 1815-1914.* Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.

Kocka J. (Hsgb.),

1983 *Europäische Arbeiterbewegungen im 19. Jahrhundert Deutschland, Österreich, England und Frankreich im Vergleich.* Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Lassalle F.,

1991 *Ausgewählte Reden und Schriften.* (Ausgabe in einem Band Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hans Jűrgen Friederici). Berlin, Dietz Verlag.

Lindemann A.S.,

1986 *A History of European Socialism.* New Haven – London, Yale University Press.

Lönne K.-E.,
1989 *Politischer Katholizismus im 19. und 20. Jahrhundert*. Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag.

Marx K – F. Engels.,
1888 *Manifesto of the Communist Party.* (Authorized English Translation. Edited and Annotated by Frederick Engels). London, William Reeves, (Repro. 1994).

Misner P.,
1991 *Social Catholicism in Europe: From the Onset of Industrialization to the First World War.* Darton, Longman and Todd.

1992 "Social Catholicism in Nineteenth-Century Europe: A Review of Recent Historiography". Dalam *The Catholic Historical Review*. Vol. 78, No. 4 (October), 581-600.

Molony J.,
1991 *The Worker Question. A new historical perspective on Rerum Novarum*. Dublin etc., – Gill and Macmillan.

Morsey R.,
1977 *Der Untergang des politischen Katholizismus: Die Zentrumspartai zwischen christlichem Selbstverständnis und >Nationaler Erhebung< 1932/33.* Zűrich – Stuttgart, Belser Verlag.

Rostow W.W.,
1960 *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sagara E.,
1980 *An Introduction to Nineteenth Century Germany.* Harlow, Essex, Longman.

Schäfers M.,
1991[5] *"Rerum Novarum – The Result of Christian Social Movements 'From Below'". Concilium.* (Edited by J. Coleman – G. Baum), London – Philadelphia, SCM Press – Trinity Press International, 3-17.

Schmidt M. - G. Schwaiger (Hrsg).,
1976 *Kirchen und Liberalismus im 19. Jahrhundert*. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht.

Schuck M.J.,
1991[5] "The Ideological Uses of Catholic Social Teaching". *Concilium.* (Edited by J. Coleman – G. Baum), London – Philadelphia, SCM Press – Trinity Press International, 47-54.

Sheehan J.J.,
1995 *German Liberalism in the Ninteteenth Century.* Atlantic Highlands, N.J.: Humanities Press, (Chicago, University of Chicago Press, 1978).